

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)
RSUD dr. DARSONO
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO

JL. A Yani No. 51 Telp. (0357) 881410 Fax. (0357) 883818 Pacitan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan tahun 2021 dapat disusun dengan baik.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan tahun 2021, dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

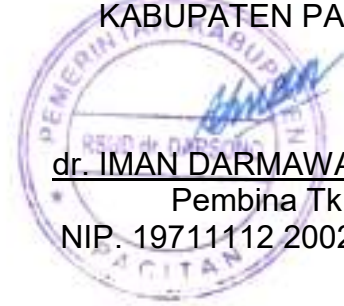
Substansi LAKIP ini menginformasikan capaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan dalam Tahun 2021, yang terkait dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021, yang sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan dan juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* serta sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Dengan diterbitkannya LAKIP Tahun 2021, diharapkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Akhir kata, kami berharap agar LAKIP Tahun 2021 dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk

menilai kinerja bagi aparatur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono
Kabupaten Pacitan.

Pacitan, Januari 2022
DIREKTUR RSUD dr. DARSONO
KABUPATEN PACITAN



dr. IMAN DARMAWAN, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19711112 200212 1 007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) adalah suatu kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini berhubungan dengan keberhasilan atau bahkan kegagalan dalam mencapai Visi dan Misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD).

Untuk mendukung pelaksanaan capaian kinerja sasaran tersebut di atas, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 mendapat anggaran keseluruhan sebesar Rp. 160.776.221.691,00 yang direalisasikan sebesar Rp. 152.912.475.183,32 atau sebesar 95,11%. Hal ini berarti anggaran yang diperoleh digunakan dengan se efisien mungkin tanpa mengabaikan efektifitas dari kegiatan yang dilakukan.

Dalam upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan beberapa kegiatan dijumpai beberapa hambatan atau kendala baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Hambatan atau kendala tersebut akan mempengaruhi target keberhasilan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja. Beberapa hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Masih terbatasnya jumlah dokter spesialis yang memberikan layanan di RSUD baik dalam jumlah maupun jenisnya.
- Masih terbatasnya jumlah ruang rawat inap / penunjang yang representatif.
- Masih terbatasnya peralatan kesehatan penunjang medis di Rumah Sakit guna mendukung dan memenuhi pelayanan yang sesuai standar.
- Masih adanya persepsi negatif atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan.

Sedangkan untuk mengatasi hambatan tersebut digunakan beberapa strategi dan alternatif pemecahan masalah antara lain :

- Memfasilitasi bagi dokter umum yang berminat untuk melanjutkan pendidikan spesialis baik melalui Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.
- Pengajuan anggaran untuk pengembangan ruang rawat inap / penunjang yang representatif baik melalui Pemerintah Daerah maupun Pusat.
- Pengajuan anggaran untuk pengadaan alat kesehatan penunjang medis serta memanfaatkan alat kesehatan yang ada secara optimal melalui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan mutu pelayanan yang sudah ada maupun menambah pelayanan yang belum ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan diketahuinya hambatan dan cara pemecahannya maka diharapkan setiap kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik sehingga target yang ditetapkan bisa terpenuhi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM SKPD	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	10
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP	10
BAB II: PERENCANAAN KINERJA	12
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD	12
B. RENCANA KINERJA (RKT) SKPD TAHUN 2021	15
C. PERJANJIAN KINERJA SKPD TAHUN 2021	20
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2021	23
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021	26
BAB IV: PENUTUP	33
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	
LAMPIRAN 1: RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021	
LAMPIRAN 2: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	
LAMPIRAN 3: PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021	

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan sebagai Rumah Sakit Pemerintah di Kabupaten Pacitan memiliki peran dan tugas penting dalam menjamin kelangsungan dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pacitan. Selaku penyelenggara pelayanan kesehatan dalam mendukung tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, saat ini dituntut untuk lebih terbuka dan dapat memberikan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk itu, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan membuat suatu Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitasnya.

Dalam rangka terselenggaranya good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat langsung berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 setiap instansi pemerintah diharuskan menyelenggarakan suatu Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu rangkaian sistematis dan berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selain itu diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rumah Sakit merupakan salah satu unsur penunjang Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dibidang pelayanan Kesehatan. Pelayanan kesehatan yang dilakukan khususnya bersifat preventif, kuratif dan rehabilitatif. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 62 Tahun 2007 maka Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan pengobatan di Rumah Sakit kepada masyarakat baik dari golongan bawah, menengah maupun golongan atas secara paripurna dan terjangkau.

Sesuai dengan perannya dibidang kesehatan maka Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan berorientasi kepada pelayanan masyarakat yang lebih bersifat sosial (nirlaba). Sedangkan dalam sumber pendanaan program kegiatan untuk operasional pelayanan masih membutuhkan subsidi dari Pemerintah. Dilain pihak subsidi yang didapat baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah sangat terbatas sementara tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan semakin meningkat. Oleh karena itu maka Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan diharapkan dapat menggunakan pendekatan Perencanaan Stratejik melalui visi dan misinya sesuai dengan keperluan/kebutuhan masyarakat.

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 maka status Rumah Sakit menjadi Rumah Sakit Swadana. Pada tahun 2001 status Rumah Sakit berubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001, yang di tindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah di Kabupaten Pacitan. Berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 14 maka Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pacitan menjadi Badan Layanan Umum yang pengelolaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 15 Tahun 2006 tentang Sistem Pengelolaan Keuangannya menggunakan Badan Layanan Umum (BLU). Berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 566 / KPTS / 408.21 / 2015, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan berubah namanya menjadi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan.

Dalam memberikan pelayanan medis bagi masyarakat Pacitan rumah sakit memiliki tenaga sebanyak 567 orang yang terdiri dari 321 orang berstatus PNS dan 246 orang tenaga non PNS, adapun rincian tenaga sebagai berikut :

No	Jenis Jabatan / Profesi	Jumlah Tenaga (Org)						
		PNS		NON PNS		Jumlah		
		L	P	L	P	L	P	Total
I	Manajemen							
1.	Eseleon III	3	2	0	0	3	2	5
2.	Eselon IV	2	7	0	0	2	7	9
II	Tenaga Medis Umum (Dokter)							
1.	Dokter Spesialis	13	9	2	2	15	11	26
2.	Dokter Umum	7	6	0	2	7	8	15
III	Tenaga Medis Dokter Gigi							
1.	Dokter Gigi Spesialis	1	3	0	0	1	3	4
2.	Dokter Gigi Umum	1	0	0	0	1	0	1

No	Jenis Jabatan / Profesi	Jumlah Tenaga (Org)						
		PNS		NON PNS		Jumlah		Total
		L	P	L	P	L	P	
IV	Tenaga Paramedis Perawatan							
1.	Perawat	5	87	46	58	51	145	196
2.	Bidan	0	23	0	17	0	40	40
V	Tenaga Paramedis Non Perawatan							
1.	Apoteker Klinik	0	1	0	0	0	1	1
2.	Apoteker	0	7	1	0	1	7	8
3.	Asisten Apoteker	9	10	1	11	10	21	31
4.	Perawat Gigi	1	1	0	0	1	1	2
5.	Analisis Laborat	2	11	1	5	3	16	19
6.	Fisio terapis	2	1	0	1	2	2	4
7.	Terapis Wicara	0	0	0	1	0	1	1
8.	Elektro Medis	3	3	0	0	3	3	6
9.	Radiografer	7	3	0	0	7	3	10
10.	Sanitarian	4	4	0	0	4	4	8
11.	Nutrisionis Ahli	2	1	0	0	2	1	3
12.	Nutrisionis	0	11	0	0	0	11	11
13.	Epidemiolog Kesehatan Ahli	1	0	0	0	1	0	1
14.	Epidemiolog Kesehatan	0	2	0	0	0	2	2
15.	Promosi Kesehatan	0	1	0	0	0	1	1
16.	Teknik Gigi	1	0	0	0	1	0	1
17.	Psikologi Klinis	1	2	0	0	1	2	3
18.	Perekam Medis	1	3	0	5	1	8	9
VI.	Tenaga Manajemen							
1.	Non Kesehatan	25	32	25	67	50	99	149
	Jumlah	91	230	76	170	167	400	567

Rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terbagi atas berbagai pelayanan :

1. Pelayanan Rawat Inap

Rumah Sakit umum Pacitan memiliki 9 ruang rawat inap yaitu :

- a. Ruang Flamboyan untuk pasien yang berkaitan dengan obsgyn;
- b. Ruang Seruni untuk pasien nifas;

- c. Ruang Melati A untuk perawatan pasien penyakit dalam
- d. Ruang Melati B untuk perawatan pasien penyakit syaraf, unit stroke;
- e. Ruang Mawar untuk perawatan pasien dengan penyakit kasus-kasus bedah;
- f. Ruang Soka A untuk pasien anak;
- g. Ruang Soka B untuk pasien covid;
- h. Ruang Dahlia untuk kasus perinatologi;
- i. Ruang Perawatan ICU (Intensive Care Unit);
- j. Ruang Isolasi Paru (Tulip);
- k. Ruang Wijaya Kusuma.

Pelayanan Rawat inap terdiri dari 188 Tempat tidur yang terinci sebagai berikut :

No	Ruang Perawatan	Jumlah Tempat Tidur						Jumlah
		Kelas I	Kelas II	Kelas III	VIP	ICU	VVIP	
1.	Melati A	4	8	14	0	0	0	26
2.	Melati B	4	4	7	0	0	0	15
	Unit Stroke	0	10	0	0	0	0	10
3.	Soka A	0	0	13	0	0	0	13
4.	Soka B	4	4	7	0	0	0	15
5.	Tulip	7	0	0	0	0	0	7
6.	Mawar	7	7	16	0	0	0	30
7.	Dahlia	0	10	0	0	0	0	10
	NICU	5	0	0	0	0	0	5
8.	Seruni	3	4	10	0	0	0	17
9.	ICU	0	0	0	0	7	0	7
10.	Wijaya Kusuma A	0	0	0	12	0	0	12
11.	Wijaya Kusuma B	12	0	0	0	0	0	12
12.	VVIP	0	0	0	0	0	4	4
	Total	46	52	67	12	7	4	188

2. Pelayanan Rawat Jalan

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan memiliki 16 Poliklinik rawat jalan yaitu :

- a. Poli Spesialis Kandungan;
- b. Poli Spesialis Penyakit dalam;
- c. Poli Spesialis Mata;
- d. Poli Spesialis Bedah;
- e. Poli Spesialis Syaraf;
- f. Poli Spesialis Anak;
- g. Poli Spesialis THT;
- h. Poli Lansia;
- i. Poli Gigi dan Mulut;
- j. Poli Konsultasi Gizi;
- k. Poli Pegawai;
- l. Poli VCT (Voluntary Counseling Test);
- m. Poli Paru;
- n. Poli Jiwa;
- o. Poli Orthopedi;
- p. Poli Aster.

3. Pelayanan Penunjang

- a. Instalasi Radiologi;
- b. Instalasi Laboratorium;
- c. Instalasi Rehabilitasi Medik;
- d. Instalasi Bedah Sentral;
- e. Instalasi Rawat Darurat (IRD);
- f. Instalasi Gizi;
- g. Instalasi Pemeliharaan Sarana (IPS);
- h. Instalasi Binatu dan Sterilisasi;
- i. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);

- j. Instalasi Farmasi;
- k. Instalasi Perawatan Jenazah;
- l. Instalasi Gas Medis.

Rumah Sakit Pemerintah pada perkembangannya Rumah Sakit dihadapkan pada situasi yang kompleks. Perubahan tersebut diakibatkan karena perkembangan IPTEK, tingginya biaya operasional Rumah Sakit dan tingginya tuntutan masyarakat serta adanya era globalisasi. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut maka pola pelayanan kesehatan di Rumah Sakit didorong untuk melakukan perubahan secara sistematis dengan tetap berorientasi terhadap pelayanan kepada masyarakat baik tingkat atas, menengah maupun pelayanan bagi masyarakat miskin.

Rumah sakit dengan karakteristik yang berbeda dari OPD lain diperlukan pengelolaan yang khusus terutama dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang dirasa sesuai dengan Rumah Sakit adalah pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud di atas diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas maka pada tahun 2006 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan yang berstatus Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pacitan mengajukan penetapan sebagai Badan Layanan Umum untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Maka terbit Peraturan Bupati Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pacitan sebagai Badan Layanan Umum. Sedangkan untuk pengelolaan keuangan diterbitkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah.

Pelaksanaan Badan Layanan Umum di Daerah lebih lanjut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Di dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa BLUD diberi fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Status Rumah Sakit sebagai Badan Layanan Umum juga diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Pasal 7 ayat 3 undang-undang tersebut menyatakan bahwa Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah Daerah harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, instansi tertentu, atau lembaga teknis daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah. Status kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan yang semula BLU bertahap selanjutnya pada tahun 2010 karena seluruh persyaratan administratif sudah terpenuhi berubah menjadi status BLU penuh sesuai dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/291/408.21/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh. Pada hakekatnya rumah sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan sehingga memiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya merupakan tanggung jawab Pemerintah. Dari aspek pembiayaan, rumah sakit membutuhkan biaya operasional dan investasi yang besar dalam pelaksanaan kegiatannya, sehingga perlu didukung dengan ketersediaan pendanaan yang cukup dan berkesinambungan.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Darsono Kabupaten Pacitan merupakan salah satu unsur penunjang pembangunan kesehatan Kabupaten Pacitan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Berdasarkan Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) Kabupaten Pacitan

Nomor 21 tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan, Peraturan Bupati Pacitan Nomor 62 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan maka tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Tugas pokok Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pengobatan di Rumah Sakit.

b. Fungsi

Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan pengobatan di Rumah Sakit;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan pengobatan di Rumah Sakit;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan pengobatan di Rumah Sakit;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur. Sedangkan susunan organisasinya adalah sebagai berikut :

a. Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- Sub Bagian Advokasi.

b. Bidang Pelayanan membawahi :

- Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang;
- Seksi Pelayanan Keperawatan.

c. Bidang Pengembangan membawahi :

- Seksi Sumber Daya Rumah Sakit;
 - Seksi Informasi dan Pengaduan.
- d. Bidang Keuangan membawahi :
- Seksi Anggaran;
 - Seksi Akuntansi dan Verifikasi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional terbagi atas :
- Medis;
 - Paramedis keperawatan;
 - Paramedis non keperawatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik..

2. TUJUAN

- a. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Menunjukkan hasil evaluasi akuntabilitas keuangan;

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi, terdiri berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Sedangkan sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 adalah :

COVER

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAM UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.
DARSONO KABUPATEN PACITAN

B. MAKSUD DAN TUJUAN

C. SISTEMATIKA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEJIK TAHUN 2016-2021

1. VISI

2. MISI

3. TUJUAN

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

1. SASARAN DAN INDIKTOR KINERJA

2. PROGRAM

3. KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2021

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN

LAMPIRAN

1. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021

2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 20

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dalam perencanaan stratejik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Darsono Kabupaten Pacitan diharapkan dapat memberikan pelayanan secara optimal yang mana dilaksanakan dengan perencanaan dan pelaksanaan yang lebih terarah. Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang lebih terarah tersebut diharapkan dapat memudahkan dalam upaya Rumah Sakit untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan. Dengan adanya pengembangan yang mengacu pada faktor internal dan eksternal stratejik maka diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang terdiri dari berbagai kekuatan ekonomi dan status sosial.

A. PERENCANAAN STRATEJIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 - 2021

Perencanaan stratejik merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Kurun waktu yang digunakan adalah 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dalam perencanaan stratejik memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana stratejik memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran). Selanjutnya strategi yang

digunakan dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan menjadi program dan kegiatan.

1. VISI

Langkah pertama yang dilakukan dalam menyusun rencana strategik adalah dengan merumuskan Visi. Tujuan penetapan Visi adalah sebagai berikut :

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh suatu organisasi;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis;
- d. Memiliki orientasi terhadap masa depan.

Visi didefinisikan sebagai cara pandang jauh ke depan kemana instansi tersebut harus dibawa agar dapat *eksis*, *antisipatif* dan *inovatif*. Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Rumah Sakit melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Rumusan visi Rumah Sakit telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dapat dibayangkan oleh semua pelaku/pemangku kepentingan pelayanan Rumah Sakit (imaginable);
- b. Memiliki nilai yang memang diinginkan dan dicita-citakan (desirable);
- c. Memungkinkan, wajar dan layak untuk mencapai dengan situasi, kondisi dan kapasitas yang ada (feasible);
- d. Memusatkan perhatian kepada isu dan permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat beroperasi dan terselenggara secara efektif, efisien dan berkelanjutan serta dapat terjamin eksistensi daerah dimasa depan (focused);

- e. Dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan zaman (flexible);
- f. Dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti oleh semua pelaku (communicable);
- g. Dapat dirumuskan dan ditulis dengan suatu pernyataan yang singkat, jelas dan padat.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas maka Visi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan dapat dirumuskan sebagai berikut : **“Terwujudnya RSUD dr. Darsono yang Berkualitas, Profesional, dan Terpercaya Dalam Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Pacitan Tahun 2021.”** Visi Rumah Sakit tersebut dimaksudkan untuk mendukung pencapaian Visi Bupati Pacitan yang merupakan Visi Kabupaten Pacitan yaitu **“Maju dan Sejahtera Bersama Rakyat”**.

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi baik instansi pemerintah maupun swasta, sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan harapan dari seluruh anggota organisasi. Selain itu dengan adanya Misi pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta untuk mendukung tercapainya Visi yang ditetapkan dan Misi Kabupaten Pacitan khususnya Misi kedua yaitu **“Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sosial masyarakat”**, maka ditetapkan Misi Rumah Sakit sebagai berikut : **“Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan Profesional dengan mengutamakan Keselamatan Pasien”**. Misi Rumah Sakit dirumuskan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi pembangunan daerah Kabupaten Pacitan. Misi tersebut disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan visi Rumah Sakit.

3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dan menjadi faktor kunci keberhasilan yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu tertentu (1-5 tahun). Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Penetapan tujuan didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang kesehatan terutama pengobatan dan pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten Pacitan. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan adalah **“Meningkatnya kualitas pelayanan Rumah Sakit”**.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

1. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
No.	URAIAN	No.	URAIAN	No.	URAIAN
1.	Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu dan profesional dengan mengutamakan keselamatan pasien	1.1	% penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit;	1.1	11,36%
		1.2	%jumlah ambulance / mobil jenazah yang berfungsi dengan baik;	1.2	81,80%
		1.3	%ruangan rawat inap, rawat jalan, penunjang medis dan kantor rumah sakit dalam kondisi baik;	1.3	74,20%
		1.4	% kelayakan peralatan pelayanan pada rawat jalan, rawat inap dan penunjang medis (kondisi baik).	1.4	86,67%
		1.5	% penyediaan sarana pelayanan kesehatan masyarakat	1.5	76,12%
		1.6	Cost recovery	1.6	≥40%
		1.7	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	1.7	47,46%

2. PROGRAM

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	122.031.300.491
a.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.629.412.739
	• Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.629.412.739
b.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	95.166.189.273,32
	• Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	95.166.189.273,32 (ambang batas)
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	29.502.021.200
a.	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	22.366.179.600
	• Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit	16.632.551.600
	• Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.733.628.000
b.	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.135.841.600
	• Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana	622.628.200
	• Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	6.411.443.400
	• Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	101.770.000
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	9.242.900.000
a.	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	9.242.900.000
	• Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	9.242.900.000
Total		160.776.221.691

3. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pemenuhan urusan penunjang kesehatan di rumah sakit	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya urusan administrasi keuangan di rumah sakit	14 bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 bulan
				Peningkatan Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan dan pendukung pelayanan rumah sakit	12 bulan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan dan pendukung pelayanan rumah sakit	12 bulan
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Sarana dan prasarana kesehatan yang representatif	100%	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ruang rawat inap rawat jalan, rawat inap dan penunjang medis dan kantor rumah sakit dalam kondisi baik	74,20 %	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah pembangunan gedung rawat inap di rumah sakit	1 paket

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
					Persentase kelayakan peralatan pada Rawat Jalan, Rawat Inap dan Penunjang Medis (kondisi baik)	86,67 %	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan alat – alat kesehatan rumah sakit	11 paket
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana layanan kesehatan dan insentif tenaga kesehatan vaksinator di rumah sakit	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah pengadaan perlengkapan ruang rawat inap (nurse station, AC, dan Partisi)	3 paket
							Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah pengadaan sarana prasarana pelayanan kesehatan di rumah sakit	3 paket

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
							Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan vaksinasi covid-19	51 orang
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit	11,36%	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit	11,36%	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan tenaga teknis yang memberikan pelayanan di rumah sakit	353 orang

C. PERJANJIAN / PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO

Jl. Jend. A. Yani No. 51 ☎ (0357) 881410 Fax. 883818 Pacitan 63511
Website : rsud.pacitankab.go.id, Email : rsud@pacitankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. IMAN DARMAWAN, M.Kes
Jabatan : Direktur RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : INDRATA NUR BAYUAJI

Jabatan : **BUPATI PACITAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Pacitan, 28 Oktober 2021

Pihak Kedua,

BUPATI PACITAN

INDRATA NUR BAYUAJI

Pihak Pertama,

**DIREKTUR RSUD dr. DARSONO
KABUPATEN PACITAN**

dr. IMAN DARMAWAN, M.Kes

Pembina Tk. I
NIP. 19711112 200212 1 007

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO
KABUPATEN PACITAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, dan profesional dengan mengutamakan Keselamatan Pasien.	Indek mutu pelayanan rumah sakit	Baik

Program	Anggaran		Keterangan
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1. Penunjang Urusan Pemerintahan/Kota Daerah	Rp. 122.136.376.155	Rp. 122.031.300.491	BLUD
2. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 23.734.448.200	Rp. 29.508.021.200	DAU,BHP/BP PUSAT,PAJAK ROKOK,DBHCHT DAK
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 2.772.148.000	Rp. 9.242.900.000	DAU
JUMLAH	Rp 148.642.972.355	Rp 160.776.221.691	


Pacitan, 28 Oktober 2021

Mengetahui
BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI

DIREKTUR RSUD dr. DARSONO
KABUPATEN PACITAN



dr. IMAN DARMAWAN, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19711112 200212 1 007

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja mencerminkan kewajiban dari suatu instansi untuk memberikan laporan pertanggungjawaban dan menjawab mengenai hal-hal yang memerlukan jawaban.

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan merupakan hasil evaluasi secara *komprensif* terhadap kinerja, termasuk di dalamnya adalah hasil analisis dan evaluasi terhadap perencanaan strategik, akuntabilitas kinerja, aspek keuangan dan lain - lain. Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja mencoba merangkum dan mencari kesesuaian antara :

- a. Perencanaan strategik dengan kinerja;
- b. Manfaat dari kebijakan;
- c. Program;
- d. Kinerja bagi pihak-pihak yang menerima benefit dari jasa yang diterimanya.

Pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan oleh hasil indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja. Selain itu pelaporan akuntabilitas kinerja juga harus menyajikan data dan informasi relevan lainnya bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan atau kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Penilaian keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai 85 s.d 100	Baik
2.	Nilai 70 s.d 85	Sedang
3.	Nilai 55 s.d 70	Kurang
4.	Nilai < 55	Sangat kurang

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi						% capaian 2021
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.1	% penduduk yang memanfaatkan RS;	11,36%	12,20%	14,62%	19,60%	17,43%	11,74%	10,19%	89,70
1.2	%jumlah ambulance / mobil jenazah yang berfungsi dengan baik;	81,80%	80%	88,9%	87,50%	88,89%	88,89%	90%	110,01
1.3	%ruangan rawat inap, rawat jalan, penunjang medis dan kantor rumah sakit dalam kondisi baik;	74,2%	72%	75%	87,18%	88,46%	92,60%	92,86%	125,19
1.4	% kelayakan peralatan pelayanan pada rawat jalan, rawat inap dan penunjang medis.	86,67%	89,48%	89,80%	89,17%	89,21%	89,03%	89,26%	102,99
1.5	% penyediaan sarana pelayanan kesehatan masyarakat	76,12%	-	88,42%	88,88%	97,52%	97,40%	97,50%	128,09
1.6	Cost recovery	≥40%	81,43%	78,33%	89,85%	80,90%	106,66%	163,96%	409,9
1.7	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	47,46%	39,31%	47,85%	54,97%	54,39%	4,08%	81,94%	172,65
Rata – rata Capaian Indikator Kinerja									162,65

Rata – rata capaian kinerja termasuk ke dalam kategori penilaian “Baik” dengan standar kategori baik adalah 85% - 100%, sedangkan capaian RSUD yaitu berkisar 162,65%.

Realisasi indikator persentase penduduk yang memanfaatkan rumah sakit pada tahun 2021 sebesar 10,19%, sedangkan target yang telah ditetapkan sebesar 11,36%, sehingga indikator ini telah tercapai sebesar 89,70%. Pada tahun 2021 jumlah pengunjung rumah sakit sebanyak 56.756 orang dengan proyeksi penduduk Kabupaten Pacitan sebanyak 557.164 orang. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh masyarakat memerlukan dan memanfaatkan rumah sakit sebagai tempat rujukan pelayanan kesehatan. Bila dibandingkan dengan tahun 2020, persentase penduduk yang memanfaatkan rumah sakit mengalami penurunan sebesar 1,55%. Dengan adanya pandemi Covid – 19, banyak masyarakat menunda waktu kunjung / periksa karena takut untuk berkunjung ke rumah sakit. Di rumah sakit sendiri selama pandemi Covid – 19 berlaku pembatasan jumlah pasien / pengunjung di rumah sakit. Selain itu proyeksi penduduk sebagai denominator pada indikator ini, tahun 2021 mengalami peningkatan, sehingga realisasi juga mengalami penurunan.

Realisasi indikator persentase jumlah ambulance / mobil jenazah yang berfungsi dengan baik pada tahun 2021 sebesar 90%, sedangkan target yang telah ditetapkan sebesar 81,80%, sehingga indikator ini telah tercapai sebesar 110,01%. Jumlah ambulance / mobil jenazah yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan sebanyak 10 kendaraan, 9 kendaraan diantaranya dalam kondisi baik dan 1 kendaraan dengan kondisi rusak. Bila dibandingkan dengan tahun 2020 indikator ini mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan anggaran untuk pengadaan dan perawatan / pemeliharaan secara berkala terhadap mobil ambulance / mobil jenazah.

Pada tahun 2021 realisasi persentase ruangan rawat inap, rawat jalan, penunjang medis dan kantor rumah sakit dalam kondisi baik sebesar 92,86%, sedangkan target yang telah ditetapkan sebesar 74,2%,

sehingga indikator ini telah tercapai sebesar 125,19%. Kondisi ruangan yang ada di rumah sakit sebanyak 28 ruang, 2 ruangan diantaranya dalam kondisi rusak. Bila dibandingkan dengan tahun 2020, indikator ini mengalami peningkatan sebesar 0,26%. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah dan pusat kepada rumah sakit untuk pembangunan dan rehabilitasi bangunan rumah sakit sehingga dapat memberikan ruang pelayanan yang representatif.

Realisasi indikator cakupan minimal kelayakan peralatan pelayanan pada rawat jalan, rawat inap dan penunjang medis pada tahun 2021 sebesar 89,26%, sedangkan target yang telah ditetapkan sebesar 86,67%, sehingga indikator ini telah tercapai sebesar 102,99%. Jumlah peralatan pelayanan pada rawat jalan, rawat inap dan penunjang medis pada tahun 2021 sebanyak 2011 unit, 1795 unit diantaranya dalam kondisi baik. Bila dibandingkan dengan tahun 2020, indikator ini mengalami penurunan sebesar 0,23%. Selain adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah dan pusat kepada rumah sakit untuk pengadaan peralatan kesehatan baik peralatan medis maupun penunjang medis namun masih ada beberapa peralatan kesehatan yang sudah melebihi umur teknis.

Pada tahun 2021 realisasi persentase penyediaan sarana pelayanan kesehatan masyarakat sebesar 97,50%, sedangkan target yang telah ditetapkan sebesar 76,12%, sehingga indikator ini telah tercapai sebesar 128,09%. Jumlah penyediaan sarana pelayanan kesehatan masyarakat berupa peralatan kesehatan yang bersumber dana cukai pada tahun 2021 sebanyak 202 unit, 197 unit diantaranya dalam kondisi baik. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan dari pemerintah daerah dan pusat untuk tersedianya peralatan baik peralatan medis maupun penunjang medis.

Realisasi indikator kinerja cost recovery tahun 2021 sebesar 409,9% dari target sebesar $\geq 40\%$, sehingga indikator ini telah tercapai sebesar 266,65%. Pendapatan fungsional rumah sakit pada tahun 2021 sebesar Rp. 39.484.886.881,22 sedangkan belanja operasional non

modal sebesar Rp. 32.064.965.770. Bila dibandingkan dengan tahun 2020 indikator ini mengalami kenaikan sebesar 27,30%. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat kesehatan keuangan rumah sakit. Dengan capaian yang sudah memenuhi target maka tingkat kesehatan keuangan di Rumah sakit semakin baik, namun demikian bantuan dari Pemerintah Pusat dan Daerah masih sangat dibutuhkan guna pengembangan Rumah Sakit.

Tahun 2021 realisasi indikator kinerja karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun sebesar 81,94% dari target sebesar 47,46%, sehingga indikator ini telah tercapai sebesar 172,65%. Jumlah karyawan yang ada di rumah sakit pada tahun 2021 sebanyak 587 orang sedangkan karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun sebanyak 481 orang. Bila dibandingkan dengan tahun 2020, indikator ini mengalami kenaikan sebesar 77,86%. Hal ini disebabkan karena kegiatan pelatihan dilakukan secara daring dan tersedianya anggaran dari pemerintah.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

No	Uraian	Indikator Kinerja	Sat	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- in put Dana	Rp	28.629.412.739	25.582.314.176	89,36
		- out put Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	bln	14	14	100
		- out come Cost recovery rate	%	≥40	163,96	409,90
2.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	- in put Dana	Rp	93.401.887.752	95.166.189.273,32	101,89
		- out put Jumlah pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan dan pendukung pelayanan rumah sakit	bln	12	12	100
		- out come Cost recovery rate	%	≥40	163,96	409,90

3.	Pengembangan Rumah Sakit	<ul style="list-style-type: none"> - in put Dana - out put Jumlah pembangunan gedung rawat inap di rumah sakit - out come % ruang rawat inap, rawat jalan , penunjang medis dan kantor rumah sakit dalam kondisi baik 	<ul style="list-style-type: none"> Rp pt % 	<ul style="list-style-type: none"> 16.632.551.600 1 74,2 	<ul style="list-style-type: none"> 13.887.017.552 1 92,86 	<ul style="list-style-type: none"> 83,49 100 125,15
4.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - in put Dana - out put Jumlah pengadaan alat - alat kesehatan rumah sakit - out come % kelayakan peralatan pelayanan pada rawat jalan , rawat inap, penunjang medis dalam kondisi baik 	<ul style="list-style-type: none"> Rp pt % 	<ul style="list-style-type: none"> 5.733.628.000 12 86,67 	<ul style="list-style-type: none"> 5.112.510.863 12 89,26 	<ul style="list-style-type: none"> 89,17 100 102,99
5.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - in put Dana - out put Jumlah pengadaan perlengkapan ruang rawat inap (nurse station, AC, dan Partisi) - out come % kelayakan peralatan pelayanan pada rawat jalan , rawat inap, penunjang medis dalam kondisi baik 	<ul style="list-style-type: none"> Rp pt % 	<ul style="list-style-type: none"> 622.628.200 3 86,67 	<ul style="list-style-type: none"> 508.628.553 3 89,26 	<ul style="list-style-type: none"> 81,69 100 102,99
6.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	<ul style="list-style-type: none"> - in put Dana - Out put Jumlah pengadaan sarana prasarana pelayanan kesehatan di rumah sakit 	<ul style="list-style-type: none"> Rp pt 	<ul style="list-style-type: none"> 6.411.443.400 10 	<ul style="list-style-type: none"> 5.681.382.585 10 	<ul style="list-style-type: none"> 88,61 100

		- Out come % kelayakan peralatan pelayanan pada rawat jalan , rawat inap, penunjang medis dalam kondisi baik	%	86,67	89,26	102,99
7.	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	- in put Dana	Rp	101.770.000	73.937.500	72,65
		- out put Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan vaksinasi covid-19	pt	51	50	98,04
		- Out come Cost recovery rate	%	≥40	163,96	409,90
8.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	- in put Dana	Rp	9.242.900.000	6.929.400.128	74,97
		- out put Jumlah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan tenaga teknis yang memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit	org	353	267	75,64
		- Out come Persentase penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit	%	11,36	10,19	89,70

Belanja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 secara terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Rincian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
				Keu.	Fisik
1.	Belanja Operasional & Pemeliharaan (BOP).	128.186.222.391	124.409.750.403,32	97,05	100
2.	Belanja Modal.	32.589.999.300	28.502.724.780,00	87,46	100
JUMLAH		160.776.221.691	152.912.475.183,32	95,11	100

Program yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 secara terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Nama Program	Realisasi (%)		Sumber Dana / Anggaran (Rp)	Masalah
		Fisik	Keu		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	101,89	DAU, BLUD, SILPA 122.031.300.491	-
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	85,39	DAU, DID, DAK, PAJAK ROKOK, DAU, DBHCHT 29.502.021.200	-
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	75,42	DAU 9.242.900.000	-
Jumlah				160.776.221.691	-

Sedangkan kegiatan yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 secara terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian	
				Keu	Fisik
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.629.412.739	25.582.314.176	89,36	100
2.	Peningkatan Pelayanan BLUD	93.401.887.752	95.166.189.273,32 (ambang batas)	101,89	100
3.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	22.366.179.600	18.999.528.415	84,95	100
4.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.135.841.600	6.193.043.191	86,79	100
5.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	9.242.900.000	6.971.400.128	75,42	100
Jumlah		160.776.221.691	152.912.475.183,32	95,11	100

Pada tahun 2021 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan memperoleh dana sebesar Rp. 160.776.221.691 yang terdiri dari :

a. Pendapatan BLUD	Rp. 75.000.000.000
b. Anggaran dari DAU	Rp. 43.915.247.539
c. Anggaran dari Cukai (DBHCHT)	Rp. 2.000.000.000
d. Anggaran dari DAK	Rp. 20.230.300.000
e. Anggaran DID	Rp. 599.038.200
f. Anggaran SILPA	Rp. 18.401.887.752
g. Anggaran Pajak Rokok	Rp. 629.748.200

Anggaran tersebut digunakan secara efektif dan efisien yaitu digunakan untuk kegiatan yang memprioritaskan pada kesinambungan pelayanan. Guna pengembangan layanan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan subsidi dari pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat masih sangat dibutuhkan. Hal ini terkait dengan peran rumah sakit di bidang kesehatan yang berorientasi kepada pelayanan masyarakat yang bersifat sosial (nirlaba). Efisiensi biaya per kegiatan secara terinci dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Biaya operasional

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7A Tahun 2014 tentang Ambang Batas Rencana Bisnis dan Anggaran pada RSUD Kabupaten Pacitan, belanja dapat melebihi dari pagu anggaran ketika realisasi pendapatan melebihi target pendapatan. Pada tahun 2021 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan melakukan efisiensi biaya pada anggaran operasional sebesar 6,44 % dari total anggaran operasional yaitu sebesar Rp. 128.186.222.391 dengan realisasi sebesar Rp. 122.644.080.287 dan sisa anggaran sebesar Rp. 8.256.002.380,32. Rincian efisiensi sebagaimana terinci pada tabel berikut :

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	
				Rp	%
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.629.412.739	25.582.314.176	3.047.098.563	10,64
2.	Peningkatan Pelayanan BLUD	89.401.887.752	89.401.887.752	-	0,00
3.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	151.055.500	109.158.163	41.897.337	27,74
4.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	760.966.400	579.320.068	181.646.332	23,87
5.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	9.242.900.000	6.971.400.128	2.271.499.872	24,58
Jumlah		128.186.222.391	122.644.080.287	8.256.002.380,32	6,44

b. Belanja modal

Pada tahun 2021 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan dapat melakukan efisiensi biaya pada anggaran belanja modal sebesar 12,54% dari total anggaran belanja modal sebesar Rp. 32.589.999.300 dengan realisasi sebesar Rp. 28.502.724.780 dan sisa anggaran sebesar Rp. 4.087.274.520. Rincian efisiensi sebagaimana terinci pada tabel berikut :

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	
				Rp	%
1.	Peningkatan Pelayanan BLUD	4.000.000.000	3.998.631.405	1.368.595	0,03
2.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	22.215.124.100	18.910.458.415	3.304.665.685	14,88
3.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.374.875.200	5.613.723.123	761.152.077	11,94
Jumlah		32.589.999.300	28.502.724.780	4.087.274.520	12,54

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2021. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Hasil evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja tahun 2021 di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan termasuk dalam kategori baik dengan nilai capaian 128,88%.

1. Keberhasilan dan kegagalan

Keberhasilan yang dicapai pada tahun 2021 adalah tercapainya semua indikator kinerja dengan kategori baik. Realisasi capaian sebesar 162,65%.

2. Hasil Akuntabilitas Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan realisasi anggaran APBD tahun 2021 sebesar 95,11%. Dari hasil realisasi tersebut maka dari anggaran APBD terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,89%

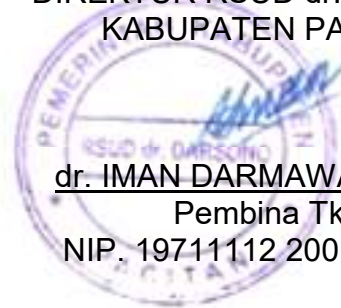
B. SARAN

1. Pemerintah Daerah diharapkan memfasilitasi bagi dokter umum dengan berstatus Pegawai Negeri di Kabupaten Pacitan yang

berminat untuk melanjutkan pendidikan spesialis baik yang dibiayai dari anggaran Pemerintah Daerah maupun Pusat.

2. Dukungan anggaran untuk pengadaan alat medis dan penunjang medis.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan diharapkan memfasilitasi percepatan pembangunan gedung rawat inap / penunjang sehingga masyarakat Kabupaten Pacitan dapat segera memanfaatkan gedung pelayanan yang representatif. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan.

Pacitan, Januari 2022
DIREKTUR RSUD dr. DARSONO
KABUPATEN PACITAN



dr. IMAN DARMAWAN, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19711112 200112 1 007

RENCANA KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO
KABUPATEN PACITAN

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	
										INDUK	PERUBAHAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pemenuhan urusan penunjang kesehatan di rumah sakit	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya urusan administrasi keuangan di rumah sakit	14 bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	21.636.376.155	28.629.412.739
				Peningkatan Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan dan pendukung pelayanan rumah sakit	12 bulan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan dan pendukung pelayanan rumah sakit	12 bulan	100.500.000.000	93.401.887.752
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Sarana dan prasarana kesehatan yang representatif	100%	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ruang rawat inap rawat jalan, rawat inap dan penunjang medis dan kantor rumah sakit dalam kondisi baik	74,20%	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah pembangunan gedung rawat inap di rumah sakit	1 paket	16.696.735.000	16.632.551.600
							Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah pembangunan gedung workshop IPS di rumah sakit	1 paket	800.000.000	0

					Persentase kelayakan peralatan pada Rawat Jalan, Rawat Inap dan Penunjang Medis (kondisi baik)	86,67%	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan alat – alat kesehatan rumah sakit	12 paket	3.783.565.000	5.733.628.000
							Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan perlengkapan ruang rawat inap (nurse station, AC, dan Partisi)	3 paket	629.748.200	0
							Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan alat – alat kesehatan rumah sakit	1 paket	1.824.400.000	0
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah pengadaan perlengkapan ruang rawat inap (nurse station, AC, dan Partisi)	3 paket	0	622.628.200
							Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah pengadaan sarana prasarana pelayanan kesehatan di rumah sakit	3 paket	0	6.411.443.400
							Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan vaksinasi covid-19	51 orang	0	101.770.000

3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit	11,36%	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit	11,36%	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan tenaga teknis yang memberikan pelayanan di rumah sakit	353 orang	2.538.173.000	9.242.900.000
		Persentase karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam dalam setahun	47,46%	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam dalam setahun	47,46%	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM rumah sakit yang mengikuti pendidikan dan atau pelatihan	300 orang	233.975.000	0
JUMLAH										148.642.972.355	160.776.221.691

DIREKTUR RSUD dr. DARSONO
KABUPATEN PACITAN



dr. IMAN DARMAWAN, M.Kes
NIP. 19711112 200112 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO

Jl. Jend. A. Yani No. 51 ☎ (0357) 881410 Fax. 883818 Pacitan 63511
Website : rsud.pacitankab.go.id, Email : rsud@pacitankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. IMAN DARMAWAN, M.Kes
Jabatan : Direktur RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : INDRATA NUR BAYUAJI
Jabatan : BUPATI PACITAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Pacitan, 28 Oktober 2021

Pihak Kedua,

BUPATI PACITAN

INDRATA NUR BAYUAJI

Pihak Pertama,

**DIREKTUR RSUD dr. DARSONO
KABUPATEN PACITAN**

dr. IMAN DARMAWAN, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19711112 200212 1 007

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO
KABUPATEN PACITAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, dan profesional dengan mengutamakan Keselamatan Pasien	Indek mutu pelayanan rumah sakit	Baik

Program		Anggaran		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 122.136.376.155	Rp. 122.031.300.491	BLUD
2.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 23.734.448.200	Rp. 29.508.021.200	DAU,BHP/BP PUSAT,PAJAK ROKOK,DBHCHT DAK
3.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 2.772.148.000	Rp. 9.242.900.000	DAU
JUMLAH		Rp 148.642.972.355	Rp 160.776.221.691	

Pacitan, 28 Oktober 2021

Mengetahui
BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI

**DIREKTUR RSUD dr. DARSONO
KABUPATEN PACITAN**



dr. IMAN DARMAWAN, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19711112 200212 1 007

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

INSTANSI : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO KABUPATEN PACITAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu dan profesional dengan mengutamakan keselamatan pasien	1.	% penduduk yang memanfaatkan RS;	11,36%	11,36%	89,70	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	9.242.900.000	6.929.400.128	74,97
	2.	%jumlah ambulance / mobil jenazah yang berfungsi dengan baik;	81,80%	90%	110,01				
	3.	%ruangan rawat inap, rawat jalan, penunjang medis dan kantor rumah sakit dalam kondisi baik;	74,2%	92,86%	125,19	1. Pengembangan Rumah Sakit	16.632.551.600	13.887.017.552	83,49
	4.	% kelayakan peralatan pelayanan pada rawat jalan, rawat inap dan penunjang medis.	86,67%	89,26%	102,99	1. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.733.628.000	5.112.510.863	89,17
						2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	622.628.200	508.628.553	81,69
					3. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	6.411.443.400	5.681.382.585	88,61	
	5.	% penyediaan sarana pelayanan kesehatan masyarakat	76,12%	97,50%	128,09				

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	6. Cost recovery	≥40%	163,96%	409,9	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.629.412.739	25.582.314.176	89,36
					2. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	93.401.887.752	95.166.189.273,32	101,89
					3. Operasional Pelayanan Rumah Sakit	101.770.000	73.937.500	72,65
	7. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	47,46%	81,94%	172,65				
JUMLAH						160.776.221.691	152.912.475.183,32	95,11

Pacitan, Januari 2022
DIREKTUR RSUD dr. DARSONO
KABUPATEN PACITAN



dr. IMAN DARMAWAN, M.Kes
NIP. 19711112 200212 1 007